

# **ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH (BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2008 – 2014.**

**Oleh : Moch. Chamdani**

*Email : mchamdani@unis.ac.id*

Dosen Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang  
Program Studi Manajemen

## **ABSTRAK**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Alokasi belanja daerah didasarkan pada kebutuhan daerah melalui prioritas anggaran dan pelayanan publik guna memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kausal empiris belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang Tahun 2008 - 2014. Berdasarkan hasil uji T dan Uji F secara parsial bahwa tidak cukup bukti terdapat pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang., Tidak cukup bukti terdapat pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang. Kemudian secara bersama-sama terbukti terdapat pengaruh simultan dan signifikan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang. Pengaruh langsung belanja langsung terhadap belanja tidak langsung sebesar 94,9 %, Pengaruh langsung belanja langsung terhadap pdrb sebesar 0,35 %, dan pengaruh langsung belanja tidak langsung terhadap PDRB sebesar 63,5 % , kemudian secara bersama-sama belanja langsung dan belanja tidak langsung memberikan pengaruh simultan dan signifikan terhadap pdrb sebesar 89,9 %, dan sisanya 10,1 % dipengaruhi oleh variable lain. Untuk mencapai nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 0 pemerintah Kabupaten Tangerang harus menutup defisit nilai konstan sebesar Rp. 132.771.632.99,-, sehingga nilai konstan menjadi positif. Kemudian untuk meningkatkann nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 1 digit dibutuhkan alokasi belanja daerah senilai Rp. 6.107.495,12,-.

Kata kunci : Belanja Langsung, Belanja Tidak langsung, Pertumbuhan Ekonomi.

## **ABSTRACT**

*Local Budget (APBD) the annual financial plan of local government established by local regulations. The allocation of regional spending based on local needs through budget priorities and public services in order to provide an immediate impact on economic growth. This study was conducted to determine the causal relationship empirically direct expenditure and indirect expenditure to economic growth in the district of Tangerang 2008 - 2014. Based on the results partial of T test and F test was not enough evidence that there are significant direct expenditure to economic growth in the district of Tangerang. Not enough evidence there are significant indirect spending to economic growth in the district of Tangerang, and Then together proved no influence signifikan simultaneous and direct expenditure and indirect expenditure to economic growth in the district of Tangerang. The direct effect of direct expenditure for indirect expenditures amounted to 94.9%, direct influence of direct expenditure to GDP of 0.35%, and the direct effect of indirect expenditure to GDP amounted to 63.5%, then jointly direct spending and not spending simultaneous direct and significant impact to the GDP amounted to 89.9%, and the remaining 10.1% is influenced by other variables. To achieve economic growth at 0 value Tangerang regency government should close the deficit constant value of Rp. 132.771.632.99,-, so that a constant value becomes positive. Then to meningkatkann value by 1 digit economic growth needed regional expenditure allocation of Rp. 6,107,495.12, -.*

*Keywords: Shopping Direct, Indirect Spending, Economic Growth.*

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan pengangguran, serta pengentasan kemiskinan. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik”, secara material maupun spiritual. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Tujuan utama pembangunan suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut Todaro, (2004) “Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan setinggi-tingginya pertumbuhan ekonomi, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”.

Dimensi tujuan pembangunan menurut Mudrajat Kuncoro, (2010:5) “Dimensi tujuan pembangunan menjelaskan urutan tahapan evolusi pengukuran ekonomi pembangunan, dari awal kemunculan teori ekonomi pembangunan yang mengukur terjadinya pembangunan dilihat dari tingkat output melalui Produk Domestik Bruto (PDB) berkembang menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengatasi kemiskinan dengan paradigma *entitlement* dan kapabilitas, kebebasan hingga pembangunan berkelanjutan”.

Anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian daerah serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang merujuk pada kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengarahkan ekonomi suatu daerah melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian daerah dengan meningkatkan secara terus-menerus pendapatan riil suatu daerah pada laju pertumbuhan, faktor-faktor produksi, dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum.

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 16, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah (Perda). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Belanja daerah berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 terdiri atas: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Kebijakan belanja pemerintah diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Didalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan mendorong meningkatnya perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno,2000). Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya yang ditandai oleh peningkatan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat bila didukung oleh berkembangnya faktor-faktor produksi baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitas. Selain itu, investasi akan meningkatkan jumlah barang modal dan teknologi.

Dalam konteks makro ekonomi, *government expenditure* (pengeluaran pemerintah) merupakan salah satu variable pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi swasta dan net ekspor. Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan salah satu wujud intervensi pemerintah didalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). “Konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu” (Mankiw, 2006: 19).

Hukum Wagner, mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah dan dipergunakan sebagai alat menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat koordinasi bagi semua

aktivitas di berbagai unit kerja, alat untuk melakukan penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah pemerintahan Provinsi Banten dengan pusat pemerintahan di Tigaraksa yaitu berada dibagian timur Provinsi Banten dan sebelah barat Kota Tangerang. Kabupaten Tangerang terletak pada posisi yang cukup strategis karena merupakan salah satu kota/kabupaten penyangga Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta). Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang sesuai dengan kewenangannya setiap tahunnya melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Proporsi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Tangerang Tahun 2008 – 2014 dapat dilihat pada table 1 dan table 2 sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2008 – 2014.**

No	Tahun	Pendapatan	Pendapatan Daerah (000.Rp)					
			Pendapatan Asli Daerah	(%)	Dana Perimbangan	(%)	Lain-lain Pendptn Yang Sah	(%)
1	2008	1,906,738,615	336,934,801	17.67	1,255,919,380	65.87	313,884,434	16.46
2	2009	1,922,811,228	372,841,974	19.39	1,376,748,938	71.60	173,220,316	9.01
3	2010	1,638,706,190	354,765,480	21.65	1,021,008,170	62.31	262,932,530	16.05
4	2011	2,224,307,766	665,231,224	29.91	1,288,462,389	57.93	270,614,153	12.17
5	2012	2,504,685,440	689,427,609	27.53	1,542,498,443	61.58	272,759,388	10.89
6	2013	3,068,018,642	1,033,942,091	33.70	1,498,947,578	48.86	535,128,974	17.44
7	2014	3,725,132,012	1,603,073,638	43.03	1,461,378,798	39.23	660,679,576	17.74

*Sumber: LRA BPKAD Kabupaten Tangerang.*

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pendapatan daerah terbesar bersumber dari dana perimbangan (transfer) pemerintah pusat, penerimaan dana perimbangan pada tahun 2008 yaitu sebesar 65,87 %, pendapatan asli daerah sebesar 17,67 % dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 16,46 %. Selanjutnya total pendapatan pada tahun 2009 pendapatan asli daerah sebesar 19,39%, dana perimbangan sebesar 71,60 % dan 9,01% dari pendapatan lain-lain yang sah. Pada tahun 2010 pendapatan asli daerah sebesar 21,65 %, dana perimbangan sebesar 62,31% dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 16,05%. Selanjutnya pada tahun 2011 pendapatan asli daerah sebesar 29,91%, dana perimbangan sebesar 57,93% dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 12,17%. Kemudian tahun 2012 pendapatan asli daerah sebesar 27,53%, dana perimbangan sebesar 61,58 % dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 10,89 %. Sedang pada tahun 2013 pendapatan asli daerah sebesar 33,70%, dana perimbangan sebesar 48,86% dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 17,44 %.

Pendapatan daerah terbesar bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dengan rata-rata perolehan setiap tahunnya sebesar 58,20 %. Sedangkan rata-rata pendapatan asli daerah setiap tahunnya mencapai 27,55 %. Dan pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah rata-rata setiap tahun sebesar 14,25 %. Bila tinjau dari pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan (transfer) yang mengalami penurunan setiap tahunnya dan pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2008- 2014 maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki peningkatan kemandirian fiskal yang lebih baik.

Selain menetapkan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Tangerang juga menetapkan belanja daerah, proporsi belanja daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2008 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 2.**  
**Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2008 – 2014**

No	Tahun	Belanja Daerah (000.Rp)					
		Total Belanja	(%)	Belanja Langsung	(%)	Belanja Tidak Langsung	(%)
1	2008	1,690,387,008	100	950,172,541	56.21	740,214,467	43.79
2	2009	2,015,224,698	100	1,155,409,218	57.33	859,815,480	42.67
3	2010	1,783,508,770	100	943,139,600	52.88	840,369,170	47.12
4	2011	2,027,969,594	100	1,113,208,712	54.89	914,761,028	45.11
5	2012	2,556,468,594	100	1,427,126,209	55.82	1,129,342,384	44.18
6	2013	2,871,204,506	100	1,696,486,655	59.09	1,174,717,851	40.91
7	2014	3,512,771,525	100	2,245,622,940	63.93	1,267,148,584	36.07

*Sumber: LRA BPKAD Kabupaten Tangerang.*

Pada tabel 2 dapat dilihat total belanja daerah kabupaten Tangerang tahun 2008 s/d 2014 setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 13.69 %. Proporsi belanja langsung terhadap belanja total tahun 2008 sebesar 56,21 %, tahun 2009 sebesar 57,33, tahun 2010 sebesar 52,88 %, tahun 2011 sebesar 54,89 %, pada tahun 2012 sebesar 55,82 %, proporsi belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 59,09 dan belanja langsung tahun 2014 sebesar 63,93 % sedangkan proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja pada tahun 2008 sebesar 43,79 %, tahun 2009 42,67 %, tahun 2010 sebesar 47,12 %, tahun 2011 sebesar 45,11 %, pada tahun 2012 sebesar 44,18 %, belanja tidak langsung pada tahun 2013 sebesar 40,1 %. dan pada tahun 2014 sebesar 36,07 %. Proporsi belanja langsung terendah terjadi pada tahun 2010 dan proporsi belanja tidak langsung terendah terjadi pada tahun 2009 yakni 42,67 % dari total belanja daerah. Bila kita lihat total belanja daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2010 belanja daerah mengalami penurunan sebesar 12 % bila dibandingkan total belanja pada tahun 2009. Sedangkan proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar (-11 %) pada tahun 2010.

**Tabel 3.**  
**Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, LPE, IHH, AHH, IPM, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten Tangerang tahun 2008-2014.**

NO	DESKRIPSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk	3,585,269	2,565,279	2,834,376	2,960,474	3,050,929	3,165,146	3,273,423
2	PDRB harga konstan	16,647,358	17,382,091	18,549,119	19,736,262	20,865,800	21,923,892	23,159,090
3	Pendapatan Perkapita	759,970	712,222	580,248	756,271	720,038	N/A	N/A
4	Upah Minimum Regional (UMR)	953,850	1,044,500	1,117,245	1,243,000	1,723,000	N/A	N/A
5	Inflasi (%)	6.25	4.02	5.59	3.6	4.3	5.88	5.69
6	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5.33	4.41	6.71	7.35	7.45	N/A	N/A
7	Percentase Penduduk Miskin	7,41	6,55	7,18	*6,42	6,22	5,71	N/A
8	Indeks harapan Hidup	67,4	67,69	67,98	68,17	68,35	N/A	N/A
9	Angka Harapan Hidup	65,4	65,61	65,79	65,90	66,01	N/A	N/A
10	Indeks Pembangunan Manusia	71,14	71.45	71.76	<b>72,05</b>	<b>72,36</b>	N/A	N/A
11	Jumlah Pengangguran	252,574	256,372	201,956	<b>204,358</b>	<b>*197,113</b>	N/A	N/A
12	Jumlah Angkatan Kerja	1,658,474	1,616,699	1,441,078	1,416,780	1,404,939	N/A	N/A

*Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang di olah*

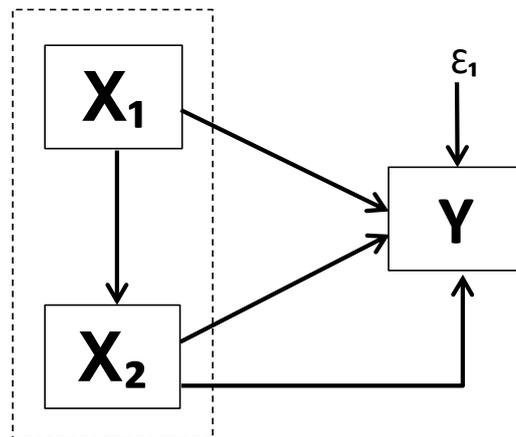
Dornbusch, (2001). menyatakan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output nasional. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan meningkatkan output agregat. Sukirno, (2006:168), berpendapat bahwa “Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan pembelanjaan penerintahan daerah terhadap berbagai pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi Negara”.

Menurut pendapat Darise, (2006:142&145), “jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian daerah”. Kemudian menurut Lincoln Arsyad, (2005:7), “Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto / Produk Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak”.

Selanjutnya menurut Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, (2007), “Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin”.

Menurut teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintahan daerah terhadap berbagai pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi pertumbuhan ekonomi daerah. Teori tersebut dapat diartikan bahwa belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki hubungan dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada teori tersebut maka dapat dibangun model teoritik pada gambar 1 sebagai berikut:

**Gambar 1.**  
**Model Teoritik**



Dari model teoritik tersebut dapat dijelaskan bahwa variable yang akan diteliti adalah Variable Belanja Langsung ( $X_1$ ) dan Variable Belanja Tidak Langsung ( $X_2$ ) sebagai variable bebas (independent) dan Variabel Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB ( $Y$ ) sebagai variable terikat.

Model teoritik ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan kausal empiris antara Variable Belanja Langsung ( $X_1$ ) dan Variable Belanja Tidak Langsung ( $X_2$ ) sebagai variable bebas (independent) terhadap Variabel Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB ( $Y$ ) sebagai variable terikat (dependent).

## **B. METODOLOGI PENELITIAN.**

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif yaitu penelitian dilakukan terhadap data dalam bentuk angka dengan maksud untuk menggambarkan hubungan dan menguji hipotesis yang bersifat hubungan antara variabel mandiri (independen) sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel terikat (dependen) sebagai variabel yang dipengaruhi.

Metode penelitian kuantitatif ini menggunakan metode survey kausal, dimana variable exogenous (bebas) adalah belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) dan variable endogenous (terikat) yaitu pertumbuhan ekonomi. Model analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*part analisis*) dengan menggunakan program komputer SPSS versi 17.0.

Variabel *exogenous* dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eskplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju kearahnya, selain pada bagian kesalahan pengukuran. Jika antara variabel *exogenous* dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah dengan kepala dua yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Dalam istilah lain, dapat disebut pula sebagai independen variabel.

Variabel *endogenous* ialah variabel yang mempunyai anak-anak panah menuju kearah variabel tersebut. Variabel yang termasuk didalamnya ialah mencakup semua

variabel perantara dan tergantung. Variabel perantara *endogenous* mempunyai anak panah yang menuju kearahnya dan dari arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Sedang variabel tergantung hanya mempunyai anak panah yang menuju kearahnya. Atau dapat disebut juga sebagai variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini diawali dengan Uji normalitas data yang bertujuan untuk menguji, apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, dengan melihat grafik normal P-P Of Regression Standard-ized residual menggambarkan penyebaran data disekitar garis diagonal yang penyebarannya mengikuti arah garis diagonal grafik. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Multikolinearitas dapat dideteksi pada model regresi apabila variable terdapat pasangan variabel bebas yang saling berkorelasi kuat satu sama lain.

Selanjutnya Uji Asumsi Klasik menggunakan Uji T adalah untuk menguji pengaruh variable bebas secara parsial atau sendiri-sendiri dengan kriteria pengujian apabila signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima atau apabila signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

$H_0: \beta_1 = 0$ , Artinya variabel belanja langsung (X1) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Tangerang.

$H_1: \beta_1 \neq 0$ , Artinya variabel belanja langsung (X1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Tangerang.

$H_0: \beta_2 = 0$ , Artinya variabel belanja tidak langsung (X2) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Tangerang

$H_1: \beta_2 \neq 0$ , Artinya variabel belanja tidak langsung (X2) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Tangerang

Jika tingkat signifikansi/probabilitas  $t$  hitung  $< t$  tabel atau Sig  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak diterima, dan jika signifikansi/probabilitas  $t$  hitung  $> t$  tabel atau Sig  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

Kemudian dilanjutkan dengan Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$  Belanja langsung (X1) dan belanja tidak langsung (X2) secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Tangerang.

$H_1 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$  Belanja langsung (X1) dan belanja tidak langsung (X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Tangerang.

Jika tingkat signifikansi/probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima dan jika tingkat signifikansi/probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Selanjutnya dilakukan Uji Path Analysis (analisis jalur) uji ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal empiris yaitu pola hubungan antar variabel dengan

tujuan mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Yaitu pola hubungan kausal empiris variable belanja langsung (X1) dan variable belanja tidak langsung (X2) Terhadap variable Pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Tangerang yang dirumuskan melalui persamaan struktural  $Y = \rho_{YX_1}X_1 + \rho_{YX_2}X_2 + \rho_Y\epsilon_1$ .

Dimana :

X1 = Belanja Langsung

X2 = Belanja Tidak langsung

Y = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

$\rho$  = Konstanta

$\epsilon_1$  = Koefisien parsial masing-masing variabel

### C. HIPOTESIS PENELITIAN.

Menurut Sugiyono (2013:59), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

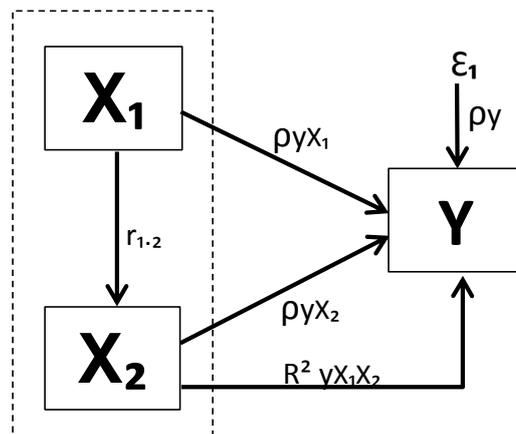
Hipotesis penelitian ini adalah diduga belanja daerah (belanja langsung X<sub>1</sub> dan belanja tidak langsung X<sub>2</sub>) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Kerangka hubungan kausal empiris variable X<sub>1</sub> dan variable X<sub>2</sub> Terhadap variabel Y dapat dirumuskan melalui persamaan struktural sebagai berikut:

$$Y = \rho_{YX_1}X_1 + \rho_{YX_2}X_2 + \rho_Y\epsilon_1$$

Dari hipotesis ini dapat dibangun model Hipotetik sebagai berikut:

**Gambar 2.**  
**Model Hipotetik**



Hubungan antar variable model hipotetik dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu :

1. Diduga ada pengaruh belanja langsung ( $X_1$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
2. Diduga ada pengaruh belanja tidak langsung ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
3. Diduga ada pengaruh secara simultan dan signifikan belanja langsung ( $X_1$ ) dan belanja tidak langsung ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Hipotesis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$H_1X_1 : r = 0$  : ada pengaruh belanja langsung ( $X_1$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

$HoX_1 : r \neq 0$  : tidak ada Pengaruh belanja langsung ( $X_1$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

$H_1X_2 : r = 0$  : ada pengaruh belanja tidak langsung ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

$HoX_2 : r \neq 0$  : tidak ada pengaruh belanja tidak langsung ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

$H_1X_1X_2 : r = 0$  : ada pengaruh belanja langsung ( $X_1$ ) dan belanja tidak langsung ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

$HoX_1X_2 : r \neq 0$  tidak ada pengaruh belanja langsung ( $X_1$ ) dan belanja tidak langsung ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1) Hasil Penelitian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26 menyebutkan belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari belanja penyelenggaraan urusan wajib, belanja penyelenggaraan urusan pilihan dan belanja penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau dengan pemerintah daerah lain. Sedangkan pada pasal 27 menyatakann belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi menurut jenis belanja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Realisasi belanja daerah kabupaten Tangerang tahun 2008 - 2014 yang dikelompokkan kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini :

**Tabel 4**  
**Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 - 2014**

No	Tahun	Belanja Daerah (000.Rp)					
		Total Belanja	(%)	Belanja Langsung	(%)	Belanja Tidak Langsung	(%)
1	2008	1,690,387,008	100	950,172,541	56.21	740,214,467	43.79
2	2009	2,015,224,698	100	1,155,409,218	57.33	859,815,480	42.67
3	2010	1,783,508,770	100	943,139,600	52.88	840,369,170	47.12
4	2011	2,027,969,594	100	1,113,208,712	54.89	914,761,028	45.11
5	2012	2,556,468,594	100	1,427,126,209	55.82	1,129,342,384	44.18
6	2013	2,871,204,506	100	1,696,486,655	59.09	1,174,717,851	40.91
7	2014	3,512,771,525	100	2,245,622,940	63.93	1,267,148,584	36.07

Sumber : LRA BPKAD Kab Tangerang 2008-2014.

Realisasi belanja daerah kabupaten Tangerang tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan sebesar 13,69 %. Realisasi belanja daerah tahun 2008 sebesar Rp. 1,690,387,008,000,-, total belanja daerah tahun 2009 sebesar Rp. 2,015,224,698,000,-, total belanja daerah tahun 2010 sebesar Rp. 1,783,508,770,000,-, total belanja daerah tahun 2011 sebesar Rp. 2,027,969,594,000,-, total belanja daerah tahun 2012 sebesar Rp. 2,556,468,594,000,- total belanja daerah tahun 2013 sebesar Rp. 2,871,204,506,000,- dan total belanja daerah tahun 2014 sebesar Rp. 3,512,771,525,000,-. Belanja daerah kabupaten Tangerang terendah terjadi pada tahun 2010 yakni mengalami penurunan sebesar 11 % dari tahun 2009.

Proporsi belanja langsung terhadap total belanja kabupaten Tangerang tahun 2008 sebesar 56,21 %, tahun 2009 sebesar 57,33, tahun 2010 sebesar 52,88 %, tahun 2011 sebesar 54,89 %, pada tahun 2012 sebesar 55,82 %, pada tahun 2013 sebesar 59,09 dan pada tahun 2014 sebesar 63,93 %. sedangkan proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja pada tahun 2008 sebesar 43,79 %, pada tahun 2009 sebesar 42,67 %, pada tahun 2010 sebesar 47,12 %, pada tahun 2011 sebesar 45,11 %, pada tahun 2012 sebesar 44,18 %, pada tahun 2013 sebesar 40,1 %. dan pada tahun 2014 sebesar 36,07 %.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Realisasi belanja langsung kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut :

**Tabel 5.**  
**Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tangerang 2008 - 2014**

No	Tahun	Realisasi Belanja Langsung (000.Rp)	(%)
1	2008	950,172,541	
2	2009	1,155,409,218	17.76
3	2010	943,139,600	-22.51
4	2011	1,113,208,712	15.28
5	2012	1,427,126,209	22.00
6	2013	1,696,486,655	15.88
7	2014	2,245,622,940	24.45

Sumber : LRA BPKAD Kab Tangerang 2008-2014.

Realisasi belanja langsung Kabupaten Tangerang Tahun 2008 sebesar Rp. 950.172.541.000,-, kemudian belanja langsung tahun 2009 sebesar Rp. 1.155.409.218.000,- atau naik sebesar 17,76 % dari belanja tahun 2008. Belanja langsung kabupaten Tangerang tahun 2010 mengalami penurunan sebesar (-22.51%) atau sebesar Rp. 943.139.600.000,- bila dibandingkan tahun 2009. Selanjutnya realisasi belanja langsung tahun 2011 sebesar Rp. 1.113.208.712.000,- atau naik sebesar 15,28% dibanding tahun 2010. Kemudian realisasi belanja langsung tahun 2012 meningkat sebesar 22 % menjadi Rp. 1.427.126.209.000,- . sedangkan realisasi belanja langsung pada tahun 2013 meningkat sebesar 15,88 % menjadi Rp. 1.696.486.655.000,- dan pada tahun 2014 realisasi belanja langsung Kabupaten Tangerang meningkat sebesar 24,45 % menjadi Rp. 2.245.622.940.000,-.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Realisasi belanja langsung kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut :

**Tabel 6.**  
**Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tangerang 2008 - 2014**

No	Tahun	Realisasi Belanja Tidak Langsung (000.Rp)	(%)
1	2008	740,214,467	
2	2009	859,815,480	13.91
3	2010	840,369,170	-2.31
4	2011	914,761,028	8.13
5	2012	1,129,342,384	19.00
6	2013	1,174,717,851	3.86
7	2014	1,267,148,584	7.29

Sumber : LRA BPKAD Kab Tangerang 2008-2014

Realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Tangerang Tahun 2008 sebesar Rp. 740.214.467.000,- atau sebesar 43 % dari total belanja tahun 2008. Belanja tidak langsung tahun 2009 sebesar Rp 859.815.480.000,- atau meningkat sebesar 13,91%, sedangkan belanja tidak langsung tahun 2010 mengalami penurunan sebesar (-2,31%) atau sebesar Rp. 840.369.170.000,- bila dibandingkan tahun 2009, hal ini karena terjadinya pemekaran sebagian wilayah kabupaten Tangerang menjadi wilayah Kota Tangerang Selatan. Kemudian tahun 2011 belanja tidak langsung kabupaten mengalami kenaikan sebesar 8,13 % atau menjadi Rp. 914.761.028.000,-. Selanjutnya tahun 2012 meningkat lagi sebesar 19 % menjadi Rp. 1.129.342.384.000,-. Kemudian tahun 2013 meningkat sebesar 3,86 % menjadi Rp.1.174.717.851.000,- dan tahun 2014 meningkat sebesar 7,29 % menjadi RP. 1.267.148.584.000,-.

Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang dari tahun 2008-2013 terus menerus mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada besaran PDRB atas dasar harga konstan tahun 2008 sebesar Rp. 16.647.358.000,-, tahun 2009 sebesar Rp. 17.382.091.000,-, tahun 2010 sebesar Rp. 18.483.033.000,-, tahun 2011 sebesar Rp. 19.664.496.000,-, tahun 2012 sebesar Rp. 20.804.088.000,- dan tahun 2013 sebesar Rp. 22.074.241.000,-. Sedangkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2008 sebesar Rp. 28.437.349.000,-, tahun 2009 sebesar Rp. 30.884.648.000,-, tahun 2010 sebesar Rp. 34.866.222.000,-, tahun 2011 sebesar Rp. 39.357.074.000,-, tahun 2012 sebesar Rp. 44.148.610.000,-, dan tahun 2013 sebesar Rp. 50.939.877.000,-.

**Tabel 7.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tangerang tahun 2008-2014**

No	Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (000.Rp)	
		Atas Dasar Harga Konstan 2000	Atas Dasar Harga Berlaku 2000
1	2008	16,647,358.000	28,437,349.000
2	2009	17,382,091.000	30,884,648.000
3	2010	18,483,033.000	34,866,222.000
4	2011	19,664,496.000	39,357,074.000
5	2012	20,804,088.000	44,148,610.000
6	2013	22,074,241.000	50,939,877.000
7	2014	23,159,090.020	56,536,641.286

Sumber : BPS Kab Tangerang 2008-2014

## 2) Pembahasan.

### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data metode Kolmogorov-Smirnov Test antara variable belanja langsung, variable belanja tidak langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto di kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Belanja Langsung (X1)	Belanja Tdk Langsung (X2)	PDRB ADHB (Y)
N		7	7	7
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	1361595125.00	989481280.57	40738631.612286
	Std. Deviation	473732316.287	199055079.697	10409025.8329399
Most Extreme Differences	Absolute	.240	.218	.142
	Positive	.240	.218	.142
	Negative	-.189	-.187	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		.634	.576	.376
Asymp. Sig. (2-tailed)		.816	.894	.999

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai uji Kolmogorov-Smirnov belanja langsung adalah 0.634, nilai uji Kolmogorov-Smirnov belanja tidak langsung adalah 0.576 dan nilai uji Kolmogorov-Smirnov Produk Domestik Regional Bruto adalah 0.376. Nilai uji masing-masing variable tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdistribusi normal.

Hasil uji One-Sample t Test variable belanja langsung dan variable belanja tidak langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**One-Sample Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Belanja Langsung (X1)	7	1361595125.00	473732316.287	179053985.273
Belanja Tdk Langsung (X2)	7	989481280.57	199055079.697	75235748.297
PDRB ADHB (Y)	7	40738631.612286	10409025.8329399	3934241.9634866

**Tabel 10**  
**One-Sample Test**

	Test Value = 0					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Belanja Langsung (X1)	7.604	6	.000	1361595125.000	923465806.44	1799724443.56
Belanja Tdk Langsung (X2)	13.152	6	.000	989481280.571	805386036.43	1173576524.71
PDRB ADHB (Y)	10.355	6	.000	40738631.6122857	31111888.326559	50365374.898012

Pada tabel 10 One-Sample Test menunjukkan nilai statistic t belanja langsung ( $X_1$ ) sebesar 7,604 (nilai t hitung = 7,604); df (degree of freedom) = 6 (derajat kebebasan = 6); Sig (2-tailed) = 0.000, kemudian nilai statistic t belanja tidak langsung ( $X_2$ ) sebesar 13,152 (nilai t hitung = 13,152); df (degree of freedom) = 6 (derajat kebebasan = 6); Sig (2-tailed) = 0.000, dan selanjutnya nilai statistic t Produk Domestik Regional Bruto sebesar 10,355 (nilai t hitung = 10,355); df (degree of freedom) = 6 (derajat kebebasan = 6); Sig (2-tailed) = 0.000, dan t tabel = 2,015

Hasil One-Sample Test menunjukkan bahwa nilai t hitung  $X_1 = 7,604$ ,  $X_2 = 13,152$ ,  $Y = 10,355$ , T tabel = 2,015, dan nilai Sig  $X_1 = 0,000$ , Sig  $X_2 = 0,000$ , Sig  $Y = 0,000$ . Karena nilai t hitung  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y$  lebih besar (>) dari t tabel, dan nilai Sig  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $Y$  lebih kecil dari  $\alpha 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini diartikan bahwa data yang dipakai dalam penelitian adalah signifikan sehingga dapat dilanjutkan pada uji selanjutnya.

**b. Uji T.**

Hasil uji signifikansi secara individual dengan menggunakan SPSS 17 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 11**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6107495.118	8270775.465		-.738	.501
	Belanja Langsung (X1)	.004	.007	.187	.599	.582
	Belanja Tdk Langsung (X2)	.042	.016	.797	2.553	.063

a. Dependent Variable: PDRB ADHB (Y)

Uji signifikansi secara individual ditunjukkan oleh tabel 11 Coefficients<sup>a</sup> sebagai berikut :

1. Pengaruh ( $X_1$ ) terhadap (Y) : pada tabel 11 Coefficients<sup>a</sup> didapat nilai Sig belanja langsung ( $X_1$ ) sebesar 0,582, nilai Sig 0,852 lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0,852 > 0,05$ ), dan  $t$  hitung adalah 0,599 lebih kecil dari  $t$  tabel 2,131 ( $0,599 < 2,131$ ) maka hipotesis penelitian adalah  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya koefisien analisis jalur adalah tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis kalimatnya adalah: Belanja langsung ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y).
2. Pengaruh ( $X_2$ ) terhadap (Y) : pada tabel 11 Coefficients<sup>a</sup> didapat nilai Sig belanja tidak langsung sebesar 0,063, nilai Sig 0,063 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ( $0,063 > 0,05$ ), dan  $t$  hitung adalah 2,553 lebih kecil dari  $t$  tabel 2,776 ( $2,553 < 2,776$ ) maka hipotesis penelitian adalah  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya koefisien analisis jalur adalah tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis kalimatnya adalah: Belanja Tidak Langsung ( $X_2$ ) tidak berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y).

### c. Uji F.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk analisisnya dari output SPSS dapat dilihat dari tabel Anova sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	616428327950247.400	2	308214163975123.700	36.628	.003 <sup>a</sup>
Residual	33658584794611.840	4	8414646198652.960		
Total	650086912744859.200	6			

a. Predictors: (Constant), Belanja Tdk Langsung (X<sub>2</sub>), Belanja Langsung (X<sub>1</sub>)

b. Dependent Variable: PDRB ADHB (Y)

Pada output anova menjelaskan ada pengaruh secara simultan dan signifikan variable bebas belanja langsung ( $X_1$ ) dan belanja tidak langsung ( $X_2$ ) terhadap variable terikat PDRB (Y). dari tabel diatas terlihat bahwa F hitung 36,628 > F tabel 6,94 dengan signifikansi/ Sig 0.003 < dari 0.05 maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya bahwa belanja langsung ( $X_1$ ) dan belanja tidak langsung ( $X_2$ ) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (Y).

### d. Uji Path Analysis

David Garson dari North Carolina State University mendefinisikan analisis jalur sebagai “Model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Model jalur digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah dimana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Regresi dikenakan pada masing-

masing variable dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedang yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang di observasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik. (David Garson, 2003).

Persamaan structural hipotesis adalah  $Y = \rho_{yx_1} + \rho_{yx_2} + \rho_y \epsilon_1$  dimana ( $X_1$ ) Belanja Langsung ; ( $X_2$ ) Belanja Tidak Langsung dan Y Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

**Tabel 13**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.974 <sup>a</sup>	.948	.922	2900800.9581240	.948	36.628	2	4	.003

Secara simultan belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran pengaruh simultan adalah R Square 0,948 atau dibulatkan menjadi 95 % merupakan kontribusi dari variabel Belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan sisanya 5 % dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 14**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	616428327950247.400	2	308214163975123.700	36.628	.003 <sup>a</sup>
	Residual	33658584794611.840	4	8414646198652.960		
	Total	650086912744859.200	6			

a. Predictors: (Constant), Belanja Tdk Langsung (X2), Belanja Langsung (X1)

b. Dependent Variable: PDRB ADHB (Y)

**Tabel 15**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6107495.118	8270775.465		-.738	.501
	Belanja Langsung (X1)	.004	.007	.187	.599	.582
	Belanja Tdk Langsung (X2)	.042	.016	.797	2.553	.063

a. Dependent Variable: PDRB ADHB (Y)

Hubungan antar variabel belanja langsung  $X_1$  dan belanja tidak langsung  $X_2$  terhadap PDRB (Y) terjadi secara simultan dan signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel anova bahwa nilai (sig)  $0.003 < 0,05$ . Pengujian signifikansi lebih lanjut diteruskan dengan pengujian individual melalui parameter statistik t. Hasil pengujian individual menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan. Dengan memperhatikan

perolehan  $\text{sig} > 0,05$  pada jalur  $X_1$ , dan  $\text{sig} > 0,05$  pada jalur  $X_2$ . Hal ini tentunya menjelaskan bahwa secara parsial belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dijadikan variabel yang berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Lebih lanjut pengaruh kausal empiris digambarkan melalui persamaan:

$$Y = \rho_{yX_1} + \rho_{yX_2} + \rho_y \epsilon_1 \text{ atau;}$$

$$Y = 0,187 X_1 + 0,797 X_2 + (1 - 0,948) \epsilon_1$$

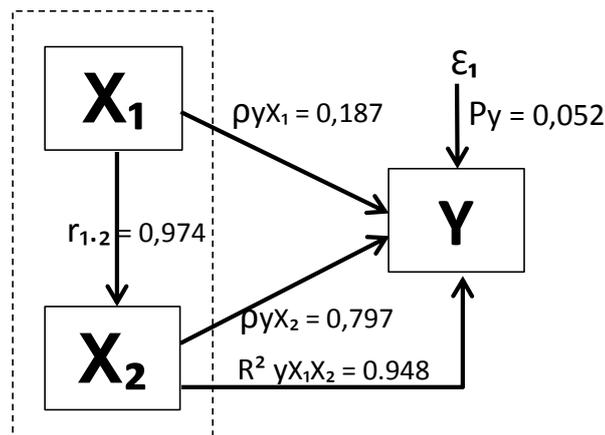
$$Y = 0,187 X_1 + 0,797 X_2 + 0,052 \epsilon_1.$$

Seraca parsial belanja langsung tidak signifikan memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), besarnya pengaruh parsial dan langsung belanja langsung ( $X_1$ ) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) adalah 0,187 atau **18,7%** sisanya 81,3 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Secara parsial belanja tidak langsung ( $X_2$ ) tidak signifikan memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y), besarnya pengaruh langsung secara parsial belanja tidak langsung ( $X_2$ ) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) adalah 0,797 atau **79,7 %** sisanya 20,3 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Diagram jalur hubungan kausal empiris Belanja Langsung ( $X_1$ ) dan Belanja Tidak Langsung ( $X_2$ ) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar. 5**  
**Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris**



Pengaruh langsung melalui hubungan korelatif kausal empiris belanja langsung ( $X_1$ ) yang secara langsung mempengaruhi belanja tidak langsung ( $X_2$ ) adalah ;  $r_{1.2} =$  sebesar  $0,974^2 = 0,949$  atau sebesar 94,9 % dan sisanya 5,1 % dipengaruhi faktor lain.

Pengaruh langsung melalui hubungan korelatif kausal empiris belanja langsung ( $X_1$ ) yang secara langsung mempengaruhi produk domestik regional bruto (Y) adalah ;  $\rho_{yX_1}$  sebesar  $0,187^2 = 0,035$  atau sebesar 3,5 % dan sisanya 96,5 % dipengaruhi oleh faktor lain.

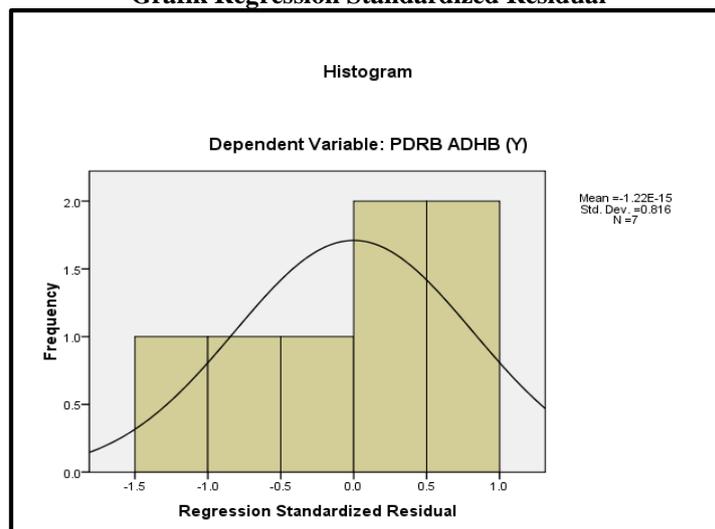
Pengaruh langsung melalui hubungan korelatif kausal empiris belanja tidak langsung ( $X_2$ ) yang secara langsung mempengaruhi produk domestik regional bruto (Y) adalah;  $\rho_{yx_2}$  sebesar  $0,797^2 = 0,63$  atau sebesar 63 % dan sisanya 37 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengaruh langsung melalui hubungan korelatif kausal empiris belanja langsung ( $X_1$ ) dan belanja tidak langsung ( $X_2$ ) yang secara bersama-sama dan langsung mempengaruhi produk domestik regional bruto (Y) adalah ;  $R^2_{yx_1 x_2}$  sebesar  $0,948^2 = 0,899$  atau sebesar 89,9% dan sisanya sebesar 10,1 % dipengaruhi oleh faktor lain.

**Tabel 16**  
**Rekapitulasi Hubungan Kausal Empiris**

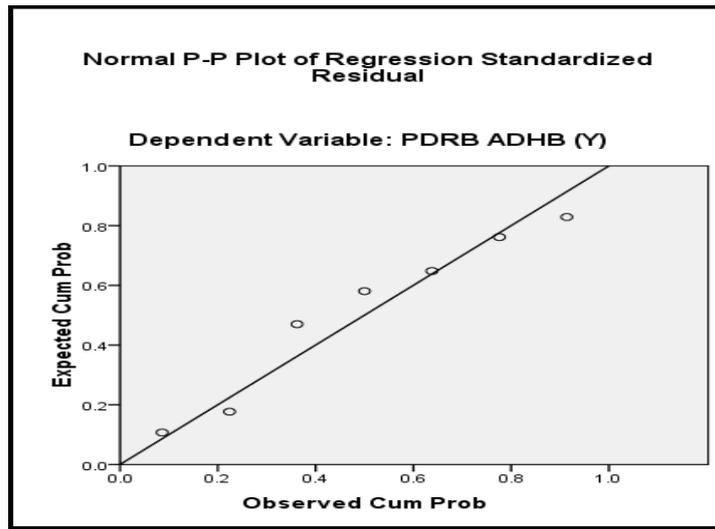
Pengaruh Variabel	Pengaruh Kausal Empiris		Sisa $\epsilon_1$	Total
	Tidak Langsung			
	Langsung	Melalui Y		
$X_1$ terhadap $X_2$	0,949		0.051	0,949
$X_1$ Terhadap Y	0,035		0.965	0,035
$X_2$ Terhadap Y	0,899		0.101	0,899
$X_1, X_2$ Terhadap Y	0,948		0.052	1.00

**Gambar 6**  
**Grafik Regression Standardized Residual**



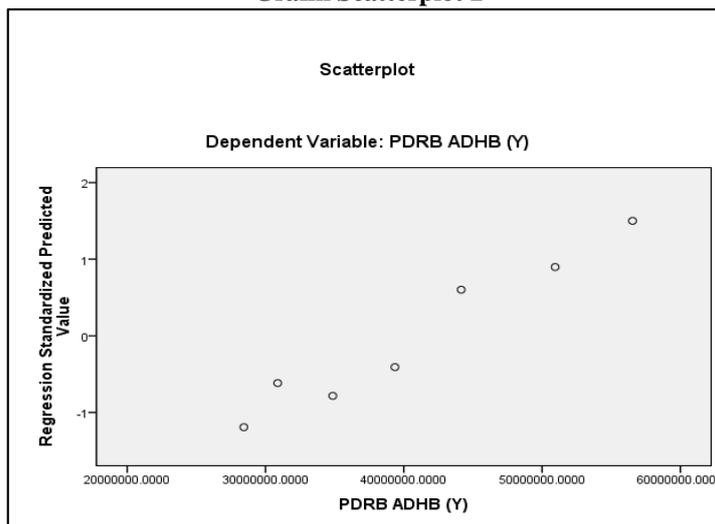
Grafik diatas berbentuk kurva melengkung yang menggambarkan bahwa data yang digunakan untuk penelitian terdistribusi normal dan menjelaskan adanya korelasi hubungan antar variable.

**Gambar 7**  
**Grafik Normal P-P Plot Regression Standardized Residual**



Grafik diatas menjelaskan bahwa model regresi yang diperoleh terdistribusi normal, hal ini dapat dilihat pada grafik Normal P-P Plot diatas bahwa posisi sebaran data yang ditunjukkan oleh titik-titik berada disekitar garis diagonal.

**Gambar 9**  
**Grafik Scatterplot 2**



Grafik diatas menggambarkan data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keajegan atau terdistribusi normal.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan kesimpulan hasil penelitian analisis pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang tahun 2008 – 2014 sebagai berikut:

- 1) Tidak cukup bukti terdapat pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang.
- 2) Tidak cukup bukti terdapat pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang.
- 3) Terbukti terdapat pengaruh belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tangerang

## **F. SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan, saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- 1) Dikarenakan nilai konstan negative, maka untuk mencapai nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 0 pemerintah Kabupaten Tangerang harus menutup defisit nilai konstan sebesar Rp. 132.771.632.99,- sehingga nilai konstan menjadi positif .
- 2) Untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 1 digit disarankan agar pemerintah Kabupaten Tangerang mengalokasikan anggaran belanja daerah senilai Rp. 6.107.495,12,-.
- 3) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah kabupaten Tangerang harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap sistem tata kelola belanja daerah melalui program-program yang efektif guna mendorong masyarakat dalam rangka meningkatkan produktifitas daerah.
- 4) Oleh karena keterbatasan data dan waktu dalam penelitian ini, disarankan kepada peneliti berikutnya untuk menambah sampel penelitian sehingga dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat mengetahui alokasi belanja daerah yang dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA:

- Mudrajad.Kuncoro* 2010. *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan. Kebijakan*, LP3ES Jakarta.
- Musgrave, Richard A and Peggy B* 2010 *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja*
- Todaro Michael.* 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi kedelapan*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com))
- Permendagri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah ([http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri\\_13\\_2006.](http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.))
- Darise dan Nurlan,* 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Sadono Sukirno,* 2006. *Makro ekonomi Teori Pengantar.* Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Lincoln Arsyad,* 2004, *Ekonomi Pembangunan STIE Yogyakarta*